

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu sentral pembangunan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan mengembangkan serta membangun kualitas SDM. Hal ini nampak jelas tercantum dalam GBHN tahun 1998 yang menyebutkan bahwa keinginan politik pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diarahkan untuk membangun kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana bangsa, negara tentram, dan adil dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sasaran pembangunan ini kemudian ditegaskan kembali dalam GBHN yaitu Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material, spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dan dinamis. Pentingnya peningkatan kualitas SDM juga disebabkan oleh semakin dibutuhkannya tenaga-tenaga ahli di bidangnya masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan direncanakan menuju pada keadaan yang lebih baik yang dicita-citakan oleh masyarakat. Proses perubahan yang menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam GBHN adalah mewujudkan suatu masyarakat seutuhnya. Pelaksanaan pembangunan diharapkan bertumpu pada trilogi pembangunan yang meliputi unsur pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional yang saling terkait karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut sehingga tercipta keseimbangan pada pada gerak pelaksanaannya sehingga hasil-hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh seluruh rakyat. Terciptanya perbaikan taraf hidup yang tercermin antara lain peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, terpenuhi kebutuhan pokok, serta berkurangnya angka kemiskinan.

Pembangunan yang dilakukan diseluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa salah satunya yaitu melalui pembangunan SDM yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Pembangunan SDM ini salah satunya dengan cara peningkatan kualitas pendidikan mengingat pendidikan adalah salah satu dasar untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Peningkatan kualitas SDM ini menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan yang mengarah pada pada sektor pendidikan. Kesiapan dan kemantapan SDM merupakan penentu utama dalam pelaksanaan pembangunan.

untuk itulah diperlukan reformasi yang mencakup upaya merenegisi sistem

pendidikan nasional dalam pembangunan nasional, mempercepat implementasi kebijakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan/pembelajaran jarak jauh, dan mengembangkan sistem pendidikan terpadu.¹

Pendidikan diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai media menuju kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya milik suatu institusi atau kelompok tertentu, tapi milik semua. Karena setiap manusia pada hakekatnya memiliki daya belajar dan membutuhkan pendidikan, maka pendidikan bukan otoritas sekolah saja dalam pelaksanaannya. Pendidikan milik semua manusia yang hidup dan mendambakan belajar. Karena milik semua maka penyelenggaraan pendidikan pun merupakan tanggung jawab bersama².

Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, memberikan ruang luas bagi lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), khususnya di daerah untuk mencari format atau model sendiri bagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil sesuai kebutuhan masing-masing. Tentu kebijakan otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikannya membawa konsekuensi kepada kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil selanjutnya.³

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas penduduk yang menguasai teknologi modern dan informasi. Di dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa “pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional”. Pengertian ini diperluas dengan tidak membatasi pada pengajaran saja melainkan

¹ H.djudju sudjana, *reformasi sistem pendidikan nasional*, pikiran rakyat, edisi selasa, 15 februari 2005

² Menurut UUD, *“Masyarakat Dalam Dunia Pendidikan”*, Jakarta, 2000, hal. 111

juga memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan keperibadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan suatu bangsa yang bertakwa pada Tuhan YME memelihara budi pekerti kemanusiaan yang memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara RI agar masing-masing memperoleh pengetahuan dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan bagi setiap rakyat untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara. Oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan jenis kelamin, agama, suku bangsa, latar belakang sosial dan kemampuan ekonomi.

Mutu/kualitas pendidikan ditandai oleh kemampuan program atau lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan cakap yang dibutuhkan oleh pasaran kerja (labour market) meskipun demikian, asumsi mekanisme pasar bebas sesungguhnya jarang diterapkan kepada bidang pendidikan terutama apabila pendidikan dipandang umum dan universal. Pada umumnya pendidikan lebih dipandang sebagai *public good* di komunitas pasar. Dalam hal ini persamaan hak keadilan dan pendistribusian kesempatan memperoleh pendidikan menjadi sangat penting. Efisien ekonomi menjadi kurang penting karena tipe program pendidikan dipandang sebagai publik service jadi kesempatan

memperoleh pendidikan harus diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat.⁴

Sementara itu di Kota Balikpapan adalah salah satu dari sekian banyak Kota di Indonesia yang juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan dunia pendidikan. Kota Balikpapan merupakan sebuah Kota yang memiliki letak yang strategis dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan dari tahun ke tahun terus berkembang pesat pembangunannya karena Kota Balikpapan juga berfungsi sebagai kota kolektor dan distributor yang memiliki potensi untuk menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal pada sektor industri seperti pengolahan tambang dan migas maupun industri ikutan lainnya yang tidak hanya melibatkan kalangan industri besar tetapi juga dari industri kecil⁵. Mau tidak mau Kota Balikpapan harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang akan terjadi.

Dari sektor pendidikan, instansi/dinas yang terkait melakukan tahap perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaruan-pembaruan terus dilakukan baik dari segi kebijakan maupun sarana dan prasarana pendukung pendidikan di seluruh lapisan masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Balikpapan diharapkan di masa depan dapat menjadi Kota yang kaya akan Sumber Daya Manusia yang handal. Oleh karena itu arah kebijakan sektor pendidikannya harus benar-benar tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur.

⁴ *Ibid*, hal 26

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2006-2011

Di sini peran Dinas Pendidikan sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung terhadap mutu pendidikan serta mengimplementasikan kebijakan sektor pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Perihal yang menjadi keputusan dari dinas tersebut yang terkait dengan kebijakan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Permasalahan yang dihadapi di Kota Balikpapan yaitu berhubungan dengan kebutuhan yang berkenaan dengan fasilitas dan lingkungan sekolah (gedung, sarana belajar dan mengajar, guru, pengelolaan, proses belajar, serta kurikulum)⁶. Alasan dipilihnya Kota Balikpapan sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut sebelumnya belum pernah dijadikan tempat penelitian peneliti lain dan permasalahan mengenai peningkatan kualitas di Kota tersebut mutlak diperlukan mengingat pentingnya pendidikan dasar dalam membentuk kualitas generasi penerus bangsa.

Untuk itu Dinas Pendidikan Kota Balikpapan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melaksanakan program-program peningkatan kualitas pendidikan antara lain:

- a. Peningkatan mutu pendidikan
- b. Peningkatan SDM (sumber daya manusia)

⁶Eddy Yusuf, *Kemampuan Dinas Pendidikan Sekolah Kota Balikpapan*, hasil wawancara tanggal 15

- c. Penyediaan jasa layanan dengan cara program PLS (pendidikan luar sekolah)

Partisipasi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada era otonomi daerah mencakup dua aspek yaitu: aspek mutu dan aspek pemerataan pendidikan. Aspek mutu pendidikan harus selalu ditingkatkan. Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Kota Balikpapan sebagai berikut: dari aspek akademik dan non akademik, kedisiplinan, kreativitas, dan kemandirian siswa belum mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Eddy Yusuf, berbagai hal yang menjadi kondisi di Kota Balikpapan adalah kualitas dan kuantitas guru yang masih rendah, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang, dari aspek akademik, kreativitas dan kemandirian siswa belum mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan kondisi lingkungan sekolah⁷.

Data APK di Kota Balikpapan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa untuk tingkat SD/MI mencapai 106,57%, tingkat SLTP/MTs 98,50% dan tingkat SMA/SMK/MA mencapai 96,68%. Pelaksanaan wajib belajar dan penanaman kesadaran pentingnya sekolah (pendidikan) belum begitu berhasil dikarenakan keadaan masyarakat dan sistem pendidikan yang ada. Aspek pemerataan pendidikan, pemerintah juga harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh anak dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini

⁷Wawancara dengan Dra. Eddy Yusuf M.Pd. Kepala Sekolah SD/MI Kota Balikpapan

bisa dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan memonitor dan evaluasi program secara regular.

Adapun permasalahan yang terkait dengan kualitas pendidikan dasar di Kota Balikpapan, pendidikan dasar masih memerlukan penanganan serius dan berkala. Salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan suatu program ditentukan oleh intensitas pemahaman para pelaku program tersebut.

Ada 5 permasalahan mendasar yang menjadi sorotan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan di Kota Balikpapan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Akses Pendidikan

Terkait dengan akses pendidikan, di beberapa wilayah masih ditemui adanya komunitas yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Khususnya komunitas yang dikategorikan hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi angkanya tidak begitu besar.

2. Permasalahan Relevansi Pendidikan

Permasalahan relevansi pendidikan, merupakan permasalahan Nasional yang terkait sejauh mana upaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa, perubahan tersebut harus direspon oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan masih belum bisa mengatasi kebutuhan guru secara cepat dan merata

3. Permasalahan Kualitas Pendidikan

Adapun permasalahan yang terkait dengan kualitas pendidikan ini dapat dicermati pada lembaga-lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar yang diharapkan, oleh karena itu perlunya upaya terpadu yang sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak.

4. Permasalahan Efektifitas dan Efisiensi dan Manajemen Pendidikan

Kemampuan manajerial dalam mengolah pendidikan merupakan permasalahan yang terkait dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah yang diposisikan sebagai manajer, masih perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Efektifitas dan Efisiensi manajemen sekolah dapat terwujud apabila pihak sekolah mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengembangkan mekanisme pengendalian secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan oyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan masih jauh dari harapan, oleh karena itu upaya membangun kesadaran kritis dalam penyelenggaraan pendidikan kunci sukses menangani permasalahan. Selain itu perlu kemitraan yang sinergis antara keluarga, masyarakat dan pemerintah

Selain dari permasalahan di atas yang menyebabkan lemahnya kualitas pendidikan dasar di kota Balikpapan adalah tingkat pendidikan guru terutama guru pendidikan dasar yang hanya tamatan D-II bukan tamatan sarjana karena mengingat guru merupakan ujung tombak dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan masa depan bangsa. Dalam program pembelajaran disekolah guru menduduki posisi sentral, guru yang berkualitas sangat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan.

Di dalam kelas gurulah yang menjadi subjek utama dalam menciptakan suasana kelas. Meski upaya perbaikan kurikulum dilakukan terus menerus tanpa dukungan guru yang kompeten pada bidangnya maka hasilnya kurang bermanfaat karena tidak akan sampai kepada peserta pendidik, oleh karena itu guru yang berkualitas sangat diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kualitas pemerataan pendidikan, pemerintah juga harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh anak dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini bisa dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan memonitor dan evaluasi program secara reguler. demikian juga alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus terus menjunjung tinggi asas keadilan dan tranparansi.⁸

Pendidikan dasar dianggap penting karena beberapa hal :

A. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁸ Linda Disti Sidi, *Menyui Mengubah Politik Mengajar Pendidikan Baru Pendidikan*, hal 24

B. Pendidikan dasar merupakan tuntutan konstitusi pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan kepala negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran sehingga pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara.

C. Bunyi Pasal 31 UUD 1945 tersebut kemudian diperjelas lagi dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 5 UU Sisdiknas tersebut menyatakan:

- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat persoalan yang menuntut adanya pembahasan yang lebih lanjut. Adapun masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

"Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dasar-Dasar Pendidikan Kota Balikpapan Tahun (2008-2009)?"

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis di harapkan hasil penelitian dapat di jadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kota Balikpapan.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar adalah teori-teori yang digunakan didalam melaksanakan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.⁹ Berdasarkan batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan-batasan tentang :

⁹ Sofyan Effendi dan Mersi Singarimbun, *metode penelitian umum*, LP2ESD, Jakarta, 1999, hal. 27

1. Implementasi Kebijakan

Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada konsep implementasi kebijakan yang merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn¹⁰ adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian kegiatan utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (negara) dapat bersifat memaksa (*compulsory instruments*) sampai yang bersifat sukarela (*voluntary instruments*). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang-undangan (manifestasi dari kebijakan publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat. Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Hoowod dan Gunn¹¹ yaitu:

¹⁰ Abdul Wahab, Solichin. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta 1997

¹¹ Abdul Wahab, Solichin. *Dasar-dasar Analisis Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta

- a. Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Menurut Grindle¹² implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*contents*) dan lingkungan (*contexts*) pelaksanaan kebijakan. Grindle menyatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun program individu dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini sering tidak berjalan mulus, tergantung pada kemampuan pelaksanaan program yang dilihat dari isi dan konteks kebijakan. Isi kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan mencakup:

¹² Grindle, Merille S. (Ed)..*Politics and Policy Implementation in the Third World*.
Princeton University Press. 1980

- a. *interests affected* (kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan)

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit di implementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

- b. *type of benefits* (jenis manfaat yang dihasilkan)

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan.

- c. *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan)

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang pementfaatannya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

- d. *site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan)

kedudukan pembuatan kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian di bawahnya.

- e. *program implementors* (siapa pelaksana program)

keputusan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir

yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses.

f. *resources committed* (sumber daya yang dikerahkan).

Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumberdaya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan.

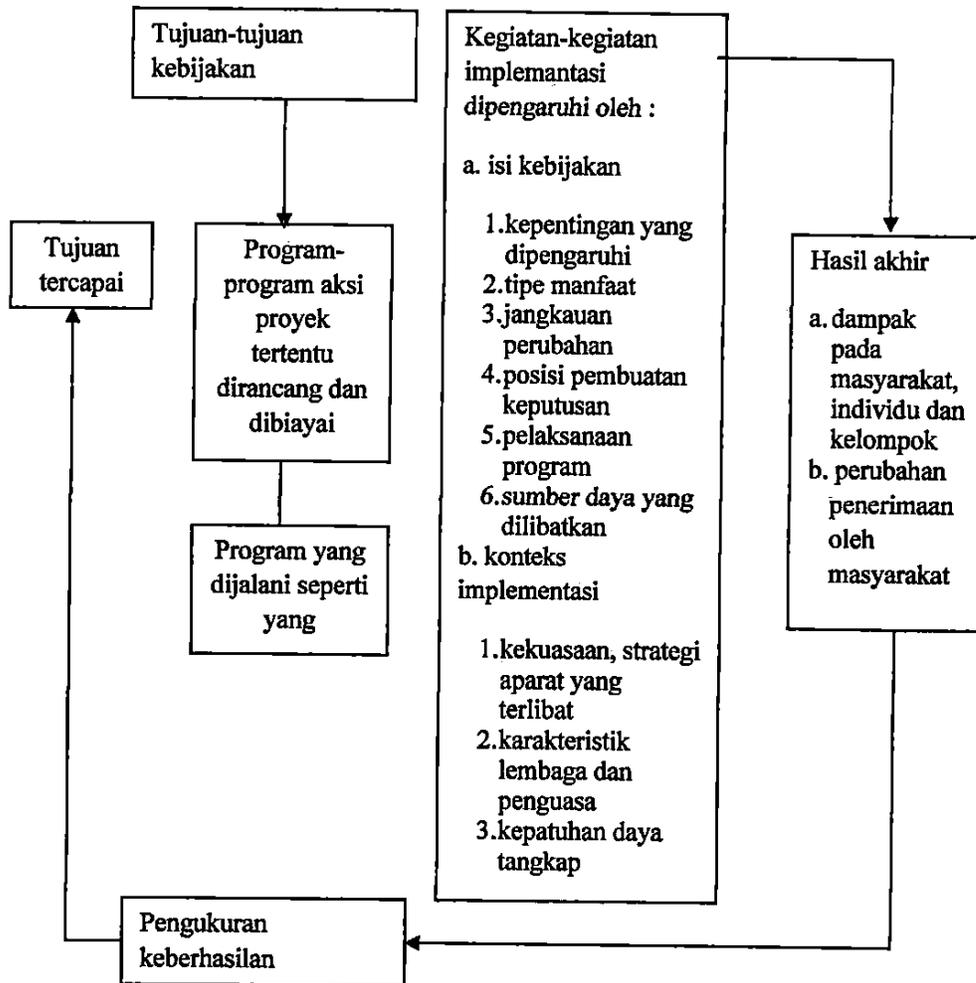
Sedangkan konteks kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup:

- a. *power, interest, and strategies of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat)
- b. *institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan penguasa); dan
- c. *compliance and responsiveness* (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana).

Lebih jelasnya akan diambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1

Model implementasi Kebijakan Menurut Grindle



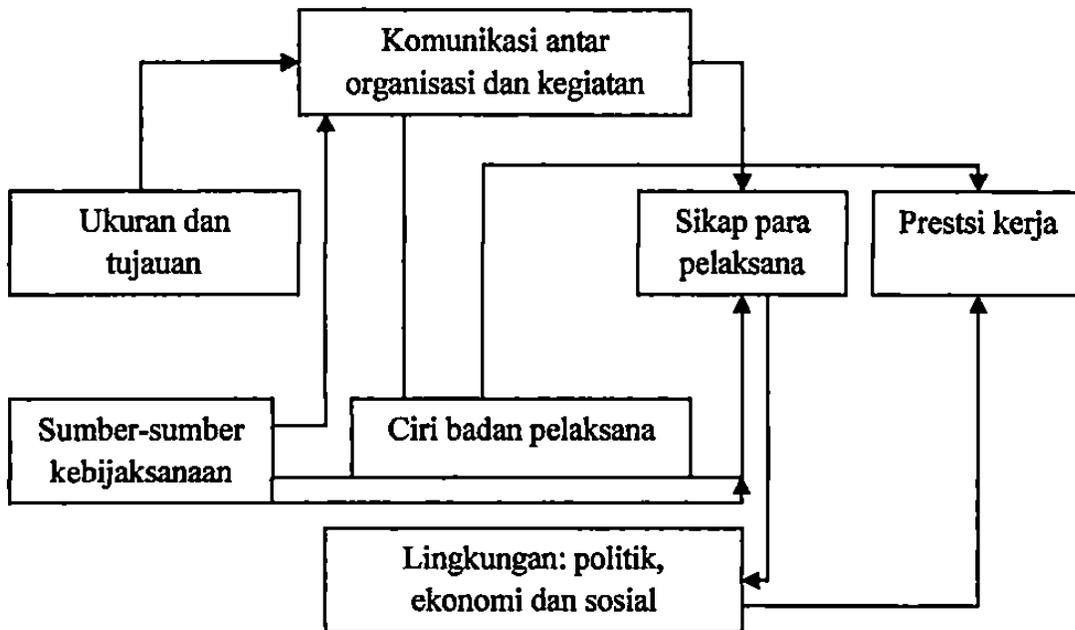
(Sumber: Samudra Wibawa, 1991:23)

Van Meter dan Van Horn¹³ merumuskan proses implementasi sebagai berikut :

"Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijaksanaan."

Gambar 1.2

Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



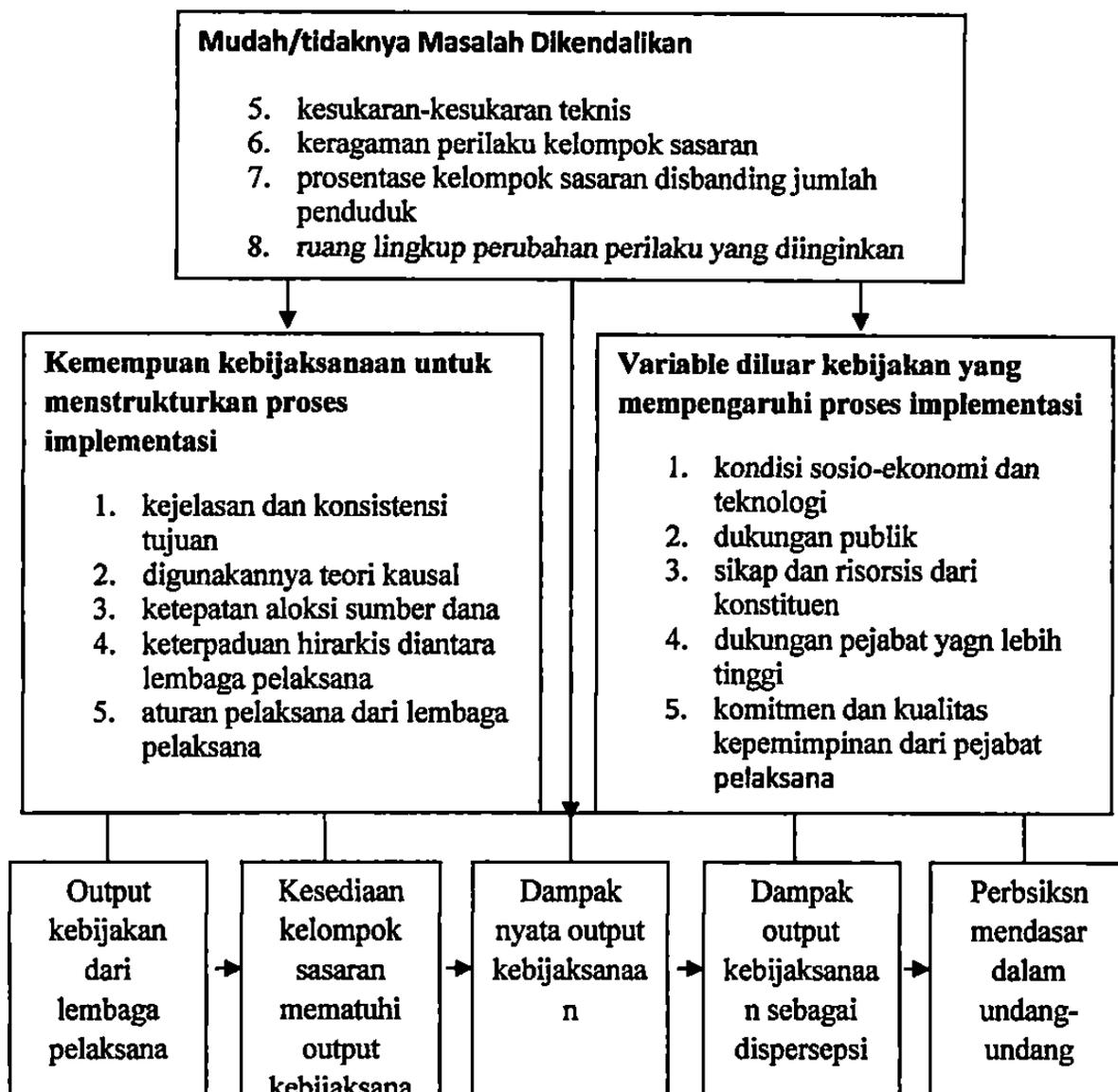
(Sumber: Samudra Wilkara, 1991:25)

Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier menjelaskan makna implementasi :

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu dinyatakan berlaku/dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian yang tumbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan mauoun untuk memumbulkan akibat atau damopak nyata pada masyarakat/kejadian-kejadian.

Gambar 1.3

Model Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier



(Sumber: Samudra Wibawa, 1991:43)

Model implementasi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Edward III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor:

- a. komunikasi
- b. sumber daya
- c. sikap implementor (*dispositions*)
- d. struktur birokrasi pelaksana

Lebih lanjut Edward III (1980 : 147 – 148) mengemukakan faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, sikap implementor, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Di samping itu secara tidak langsung factor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keberhasilan. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program sangat tergantung oleh adanya faktor-faktor pendukung yang terlibat didalamnya. Faktor-faktor pendukung itu adalah :

- a. Hubungan ketergantungan kecil
- b. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- c. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- d. Tersedianya waktu dan sumber sumber yang memadai

- e. Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar memadai

Implementasi kebijakan yang dalam operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat dua unsur pendukung yang penting dan mutlak, yaitu :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Target group yaitu kelompok penerima manfaat program
- c. Unsur pelaksana yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut (Abdulla M. Syukur, 1998:52).

Suatu implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsip nya suatu kebijakan dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh pemerintah.

2. Peran Dinas Pendidikan

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*) adalah sebagai berikut:

*“Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melakukan suatu peranan”.*¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pangantar* Balaiunli Press, Yogya, 1987, hal 220

Beliau juga mengutip pendapat Levinson bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hal yakni ;

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, memberikan ruang gerak bagi lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), khususnya di daerah untuk mencari format sendiri bagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil sesuai kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya otonomi pendidikan, peran pengelola pendidikan berada ditingkat sekolah. Peran pemerintah lebih ditekankan kepada pelayanan agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota dalam menjalankan fungsinya tidak berbeda jauh dengan fungsi Pemerintah Pusat, hanya saja ruang lingkungannya lebih kecil.

Dari sektor pendidikan, instansi/dinas yang terkait melakukan tahap perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaruan-pembaruan terus

pendidikan diseluruh lapisan masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Balikpapan diharapkan di masa depan dapat menjadi Kota yang kaya akan Sumber Daya Manusia yang handal. Oleh karena itu arah kebijakan sektor pendidikannya harus benar-benar tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur.

Di sini peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan serta mengimplementasikan kebijakan sektor pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Perihal apa yang menjadi keputusan dari dinas tersebut yang terkait dengan kebijakan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

3. Dinas Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Kota Balikpapan sebagai daerah otonom melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004.

Sehingga untuk melaksanakan kewenangan dibidang pendidikan maka perlu membentuk Dinas Pendidikan Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Balikpapan. Keberadaan Dinas tersebut tentunya

diharapkan memiliki tugas dan fungsi seperti yang tertuang di dalamnya. adapun dalam peraturan daerah ini yang dimaksud adalah :

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Balikpapan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Balikpapan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan

Tugas Pokok, Fungsi, dan Program

a. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan.

b. Fungsi

1. Penyiapan pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah.
2. Pendirian dan pembinaan sekolah.
3. Pengaturan dan pengurusan penerimaan murid baru, keuangan, ketatalaksanaan, ketenagaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan fasilitas sekolah, ijazah pada TK, SD, SLTP.
4. Penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan Dasar.

c. Program

1. Peningkatan Mutu

- a. Pelaksanaan KKG (kelompok kerja Guru) dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah).
- b. Sosialisasi dana BOS

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Diklat CAKEP (Calon Kepala)
- b. Perluasan kesempatan belajar

- d. Pelatihan dan pelataran
- e. Peningkatan kuantitas guru

3. Penyediaan Jasa Pelayanan

- a. Pelaksanaan program kejar paket A
- b. Pelaksanaan program kejar paket B

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

a. Kualitas

Kualitas sering diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*costumer satisfaction*) atau konfirmasi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*confirmation to the requirements*).¹⁵

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. orang yang berbeda akan mengartikannya secara berbeda pula. Beberapa definisi yang kerap kita jumpai antara lain :

- Kesesuaian dengan tuntutan atau persyaratan
- Kecocokan untuk pemakaian
- Penyempurnaan/perbaikan berkelanjutan
- Bebas dari kerusakan/cacat
- Pemenuhan keutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat
- Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.¹⁶

Dari uraian di atas kualitas memang sebuah kata yang sulit didefinisikan, tetapi orang akan mengetahui bila melihatnya. Sebagian besar orang mengaitkan kualitas dengan produk barang dan jasa, tetapi sebenarnya kualitas lebih dari itu, kualitas juga termasuk proses lingkungan dan manusia. Kualitas merupakan sebuah kata yang bagi para penyedia jasa adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Keunggulan dan kelebihan suatu produk atau jasa tergantung dari kualitas yang diberikan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat atau belum.

Berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas mengupayakan terjalinnya kemitraan antara Pemerintah, pendidikan, dan dunia bisnis. Karena indikator dari keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan didasarkan atas kemampuan program atau lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan cakap yang dibutuhkan oleh pasaran kerja. Dengan demikian kemitraan antara Pemerintah, pendidikan dan dunia bisnis harus benar-benar memanfaatkan potensi lokal sebagai basis pengembangan lembaga pendidikan dengan mengakomodasi kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan profesionalisme para pegawai dan pejabat pemerintah daerah¹⁷.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan. Peningkatan kualitas merupakan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengembangkan potensi-potensi dan aspek-aspek yang tersedia dan merupakan suatu usaha yang ditempuh dengan cara sungguh-sungguh

¹⁶ Tjiptono, dalam Sedarmayanti, *Restrukturisasi Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Aktual Bandung 2000, hal 202

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak-pihak terkait.

Karena otonomi pengelolaan pendidikan berada di tingkat sekolah maka peranan pemerintah adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada kepala sekolah agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ini hanya mencakup dua aspek yaitu mutu dan pemerataan.

Pemerintah menetapkan mutu standar pendidikan dan akan berupaya agar semua siswa dapat berpotensi setinggi mungkin, juga berupaya agar semua sekolah dapat mencapai standar minimum mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antar sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin.

Pemerintah juga menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis dan monitoring program secara reguler. Demikian juga alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi.

b. Pendidikan

Dalam pengertian sederhana dan umum pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan atau dengan kata lain pendidikan dapat diartikan sebagai suatu keadaan bangsa itu sendiri yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan, pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efektif, dan efisien akan mampu mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945

c. Pendidikan Dasar

Dalam Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1990. Disebutkan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau pendidikan yang sederajat.

Ciri-ciri esensi dari pendidikan dasar menurut tim pengarah dan tim materi peningkatan wawasan kependidikan guru menyebutkan

- a. Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang berarti pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali.
- b. Pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau yang sederajat.
- c. Pendidikan dasar tidak bersifat *uniform*, meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum tidak semua peserta didik mendapatkan materi kurikulum yang sama seluruhnya.
- d. Pendidikan dasar dilakukan di jalur sekolah dan di luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan

- e. Lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya sehingga memberikan keleluasan gerak bagi peserta didik.¹⁸

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berfungsi memberi bekal dasar pembangunan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga berfungsi untuk mempersiapkan mengikuti pendidikan belajar menengah, karena itu bagi setiap rakyat Indonesia harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, dan tiap-tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan yang sekurang-kurangnya mampu membekali dirinya dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan ini dilaksanakan antara umur 6-12 tahun.¹⁹

Pendidikan dasar memiliki beberapa tujuan pokok yaitu mempersiapkan anak didik menjadi (1) orang yang bermoral; (2) seseorang wajib negara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara; (3) orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan dengan cara memberikan keterampilan dasar yang umum bagi semua pekerjaan di dalam suatu masyarakat kepada anak didik.²⁰

Biasanya isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian pelajaran tentang :

- a. Pendidikan Agama
- b. Pendidikan Kewarganegaraan

¹⁸ Tim Dosen IKIP, *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hal 5

¹⁹ Eusd Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Binaka Cipta, Jakarta 1997, hal 24

- c. Bahasa
- d. Matematika
- e. Ilmu Pengatauan Sosial
- f. Ilmu Pengatuan Alam
- g. Keterampilan/Kejuruan
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga
- i. Muatan lokal²¹

E. Definisi konsepsional

Definisisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konsepsional dalam pembahasan ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

2. Peran Dinas Pendidikan

Peran Dinas Pendidikan sangat penting karena merupakan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan serta mengimplementasikan kebijakan sektor pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerahnya, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

3. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah unsur perangkat Daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah dibidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah

4. Peningkatan kualitas pendidikan dasar

Dalam Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1990. Disebutkan pendidikan Dasar merupakan pendidikan sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau pendidikan yang sederajat.

Peningkatan kualitas merupakan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengembangkan potensi-potensi dan aspek-aspek yang tersedia dan merupakan suatu usaha yang ditempuh dengan cara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak-pihak terkait

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable.

Peran dinas pendidikan kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar tahun 2008-2009 sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu

a. Pelaksanaan KYC (dalam hal ini Guru) di KPS (Kelas) di KPS

G. Metode penelitian

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah.²²

Winarso surachman berpendapat metodologi adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kerja untuk memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi tepat. Sedangkan menurut Moh, Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual atau secara akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.

²² Op.cit, hal 39

²³ MohNazir, dalam Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, hal 62

- b. Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan stakeholdernya yang terlibat dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dasar.

3. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.
- b. Data Sekunder: data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai kebijakan pendidikan.

4. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan.

Adapun alasan memilih Dinas Pendidikan Balikpapan sebagai daerah penelitian adalah :

- a. Balikpapan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur yang dituntut tinggi kualitas sumber daya manusianya
- b. Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pendidikan dasar dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan di wilayahnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain:

1. Kasub Dinas Pendidikan Sekolah : Drs, Eddy Yusuf. M.Pd
2. Kasub Bagian Kepegawaian : Mariani, S.Sos
3. Kasub Dinas Pendidikan Luar Sekolah : Rifani, S.Pd, SH, M.Pd
4. Seksi Pendidikan Dasar : Dra.Hj. Farida Ibrahim
5. Seksi Alat Pelajaran, Sarana & Prasarana : M. Sakir, SH
6. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah : Dra. Pratiti, H. MPd
7. Seksi Pendidikan Menengah : Roy Han, S.Pd
8. Guru SDN 012 Kecamatan Beliknaga Tengah : Dahmat suaidullah S Pd

9. Siswa-siswi SDN 012 Kecamatan Balikpapan Tengah: Ani Lestari & Herman.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil.

6. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisis data adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh dari berbagai aspek wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi